

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1 Nilai optimalisasi penerimaan Negara/Daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	175	
	Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara yang Terealisasi	Rupiah (Juta)	-	
	Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan PAD	Rupiah (Juta)	175	
	1.2 Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	292	
	Potensi Penerimaan Negara yang Dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	-	
	Pengawasan atas Potensi Pendapatan Asli Daerah	Rupiah (Juta)	292	
	1.3 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	186.551	
	Nilai efisiensi pengeluaran Pemerintah Daerah	Rupiah (Juta)	185.428	
	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	1.123	
	1.4 Nilai penyelamatan keuangan negara	Rupiah (Juta)	40.679	
	1.5 Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer	Rupiah (Juta)	118	
	1.6 Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah	Rupiah (Juta)	59	
	2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	2.1 Jumlah PP yang tercapai sesuai target	Program	2
		2.2 Jumlah KP yang diawasi	Prioritas Kegiatan	7
		2.3 Jumlah KP yang tercapai sesuai target	Prioritas Kegiatan	7
		2.4 Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Prioritas Proyek Strategis Nasional	-
2.5 Jumlah Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai Target		Program	1	
2.6 Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik		Persen	13	
2.7 Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan		Persen	80	
3. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	3.1 Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN		
	Persentase badan usaha dengan pengelolaan korporasinya baik	Persen		
	3.2 Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD		
	Persentase BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	Persen		
3.3 Jumlah BUMD dengan dengan kinerja sehat	BUMD	3		

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
		Persentase BUMD dengan kinerja sehat	Persen	27
	3.4 Jumlah BLUD dengan dengan kinerja sehat		BLUD	1
	Persentase BLUD dengan kinerja sehat		Persen	5
	3.5 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan		BUMDes	22
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	4.1 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100
		4.2 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	75
		4.3 Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	-
		4.4 Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Badan Usaha	-
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	5.1 Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	K/L/Pemda	7
		Persentase APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Persen	64
		5.2 Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	K/L/Pemda	5
		Persentase K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Persen	45
		5.3 Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Pemda	-
		Persentase Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Persen	-
		5.4 Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	PemKab/Kota	2
		Persentase Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Persen	20
		5.5 Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Persen	0
		5.6 Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	Rekomendasi	1
		5.7 Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Desa	40
		5.8 Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	21
		5.9 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	2
		5.10 Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	BUMN	-
		Persentase BUMN dengan MRI \geq Level 3	Persen	-
		5.11 Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	BUMD	-
		Persentase BUMD dengan MRI \geq Level 3	Persen	-
		5.12 Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	-
		Persentase BLUD dengan MRI \geq Level 3	Persen	-
		5.13 Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BUMD	-
		Persentase BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	Persen	-
		5.14 Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BLUD	-
		Persentase BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	Persen	-
6	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	6.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	76
		6.2 Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	Persen	100
		6.3 Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100
		6.4 Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	Persen	100
		6.5 Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	87
		6.6 Persentase SPM yang terbit tepat waktu	Persen	91
		6.7 Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	Persen	100
		6.8 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)		Baik
		6.9 Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	81
		6.10 Maturitas SPIP Unit Kerja	Level 1-5	Level 3

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	4
	6,11 Indeks MR Unit Kerja	Level 1-5	Level 3
	6,12 Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Indeks Skala 100	76
	6,13 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks Skala 100	75

Kegiatan	Anggaran
1. Pengawasan Pembangunan di Perwakilan	Rp. 904.432.000,00
2. Pelaksanaan Dukungan Manajemen	Rp. 23.846.244.000,00
Jumlah	<u>Rp. 24.750.676.000,00</u>

Kepala BPKP,

Muhammad Yusuf Ateh
NIP 19640809 198503 1 001



Jakarta, 15 Februari 2021

Kepala Perwakilan,

Aryanto Wibowo
NIP 19680111 198803 1 001